



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman – Senayan

J A K A R T A 10270

Telepon : 021- 5711144 (*Hunting*)

Laman : [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)

## PENGUMUMAN

Nomor: ~~39445~~/A.A3/KP/2017

### KELULUSAN PESERTA

#### SELEKSI CALON APARATUR SIPIL NEGARA (CASN)

#### GURU GARIS DEPAN TAHUN 2016

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dari Program Guru Garis Depan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyerahkan Penetapan Kebutuhan Formasi dan Hasil Seleksi Kompetensi Dasar Guru Garis Depan 2016 ke Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten (Gubernur/Bupati) pada hari Jum'at s.d. Sabtu, 16 s.d. 17 Juni 2017 di Hotel Grand Sahid Jaya.

Selanjutnya, peserta dapat melihat pengumuman kelulusan seleksi CPNS GGD yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten. Pengumuman dan lampiran pengumuman kelulusan CPNS GGD yang telah dilaporkan oleh pemerintah daerah ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, secara berkala akan diunggah ke laman [cpns.kemdikbud.go.id](http://cpns.kemdikbud.go.id).

Untuk tahapan proses berikutnya, yaitu usul pengesahan dan penetapan sebagai CPNS, bagi peserta yang lulus diminta segera menyiapkan dokumen-dokumen sebagaimana pada lampiran pengumuman ini. Dokumen dikirim ke Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, PO BOX 2913 JKP 10029 selambat-lambatnya tanggal 9 Juli 2017 cap pos.

Mekanisme, prosedur, dan jadwal pelaksanaan pemberkasan dalam rangka penetapan NIP dan SK CPNS akan dilaksanakan secara terpadu antara BKD Pemerintah Provinsi/Kabupaten dan Kantor Regional BKN dengan difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Proses tersebut direncanakan dilaksanakan pada bulan Juli s.d. Agustus 2017. Teknis pelaksanaan dan jadwal kegiatan penetapan NIP dan SK CPNS akan disampaikan menyusul melalui surat resmi ke BKD Pemerintah Provinsi/Kabupaten dan Kantor Regional BKN.

Perlu kami ingatkan bahwa seluruh proses penerimaan CPNS Guru Garis Depan tidak dipungut biaya apapun sesuai dengan Program Pemerintah mengenai Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

Jakarta, **3** Juli 2017

Sekretaris Jenderal,



Didik Suhardi

NIP. 196312031983031004

Sesuai Peraturan Kepala BKN Nomor 9 Tahun 2012 Tanggal 6 Agustus 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS, setiap peserta seleksi yang dinyatakan lulus wajib mempersiapkan dokumen-dokumen dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Kelengkapan Berkas
1	Surat lamaran yang ditulis tangan dan ditandatangani sendiri dengan tinta hitam, ditujukan kepada Gubernur/Bupati masing-masing provinsi/kabupaten dibuat pada saat tanggal pendaftaran.
2	Fotokopi ijazah/STTB dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan. Ijazah yang diperoleh dari sekolah/ perguruan tinggi luar negeri harus mendapat penetapan penyetaraan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
3	Pasfoto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 7 (tujuh) lembar, dengan menuliskan nama dan tanggal lahir dibalik pasfoto tersebut.
4	Daftar riwayat hidup yang ditulis dengan tangan sendiri memakai huruf kapital/balok dan tinta hitam, serta telah ditempel pasfoto ukuran 3 x 4 cm, sesuai dengan Anak Lampiran I-c Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002 yang formulirnya dapat diunduh di <a href="http://cpns.kemdikbud.go.id">cpns.kemdikbud.go.id</a> . Dalam kolom riwayat pekerjaan agar diisi pengalaman pekerjaan yang dimiliki.
5	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib/POLRI. (asli dan fotokopi yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang)
6.	Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter (cacat fisik tidak berarti tidak sehat jasmani). (asli dan fotokopi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang)
7.	Surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari unit pelayanan kesehatan pemerintah. (asli dan fotokopi yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang)
8.	<p>Surat pernyataan ditulis tangan memakai huruf kapital/balok dan tinta hitam yang berisi tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;</li> <li>b. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai BUMN/BUMD dan pegawai swasta;</li> <li>c. tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri;</li> <li>d. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh pemerintah; dan</li> <li>e. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.</li> </ul> <p>Format surat dimaksud tersedia pada Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002 dan dapat diunduh di <a href="http://cpns.kemdikbud.go.id">cpns.kemdikbud.go.id</a></p>
9.	Surat Rencana Penempatan dari minimal pejabat eselon II yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian yang akan menerima penempatan (dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah daerah yang bersangkutan).
10.	Surat pernyataan tidak sedang terikat kontrak kerja pada instansi pemerintah/ lembaga swasta yang ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas materai 6000 rupiah.





# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman – Senayan

J A K A R T A 10270

Telepon : 021- 5711144 (*Hunting*)

Laman : [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)

Nomor : ~~38876~~ /A.A3/KP/2017

21 Juni 2017

Lampiran : satu set

Hal : Tindak Lanjut Penyerahan Penetapan Kebutuhan Formasi  
dan Hasil SKD Guru Garis Depan Tahun 2016

Yth.

1. Para Gubernur

2. Para Bupati

(sebagaimana daftar terlampir)

Sehubungan dengan telah diserahkannya Penetapan Kebutuhan Formasi dan Hasil Seleksi Kompetensi Dasar Guru Garis Depan Tahun 2016 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi/Kabupaten, yang dilaksanakan pada tanggal 15 s.d. 16 Juni 2017 bertempat di Hotel Grand Sahid Jaya, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Pejabat Pembina Kepegawaian baik pemerintah Provinsi maupun Kabupaten agar segera mengumumkan hasil kelulusan CPNS GGD Tahun 2016 di lingkungan pemerintah daerah masing-masing sesuai dengan penetapan kebutuhan formasi dan hasil SKD yang diterima selambat-lambatnya 23 Juni 2017. Pengumuman dilakukan baik secara offline maupun online di website masing-masing pemerintah daerah.
2. Pengumuman berikut alamat laman diunggahnya pengumuman tersebut mohon dapat disampaikan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan u.p Kepala Biro Kepegawaian, Gedung C Lantai 5 Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta, atau melalui email [dina.oktafia@kemdikbud.go.id](mailto:dina.oktafia@kemdikbud.go.id). untuk kami muat ulang pada laman pendaftaran CPNS GGD.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian, melalui BKD agar segera berkoordinasi dengan Kantor Regional untuk persiapan penetapan NIP CPNS. Perlu kami sampaikan bahwa proses penetapan NIP dan SK CPNS akan dilakukan secara terpadu satu atap antara BKD Provinsi/Kabupaten dengan Kantor Regional di Jakarta dengan difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saat ini berkas-berkas kelengkapan pengusulan NIP CPNS telah tersedia dan telah diperiksa oleh Tim Badan Kepegawaian Pusat. Atas kekurangan berkas yang ada, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan mengumumkannya melalui laman [cpns.kemdikbud.go.id](http://cpns.kemdikbud.go.id) dan telah menyediakan kotak pos PO BOX penerima. Oleh karena itu, Pejabat Pembina Kepegawaian tidak perlu meminta kelengkapan usul pemberkasan dari peserta.
4. Proses penetapan NIP dan SK CPNS terpadu rencananya akan dilaksanakan pada kurun waktu Juli s.d. Agustus 2017. Jadwal dan kelengkapan yang dibutuhkan akan kami sampaikan menyusul.

Atas perhatian dan bantuan Saudara kami mengucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Sekretaris Jenderal,



Didik Suhardi

NIP 196312031983031004

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Lampiran Surat Sekretaris Jenderal

Nomor : 38876/A.A3/KP/2017

Hal : Tindak Lanjut Penyerahan Penetapan Kebutuhan Formasi  
dan Hasil SKD Guru Garis Depan Tahun 2016

DAFTAR TUJUAN SURAT

No.	Daftar Tujuan Surat
1	Gubernur Aceh
2	Gubernur Bengkulu
3	Gubernur Gorontalo
4	Gubernur Jawa Timur
5	Gubernur Kepulauan Riau
6	Gubernur Kalimantan Tengah
7	Gubernur Kalimantan Utara
8	Gubernur Nusa Tenggara Barat
9	Gubernur Nusa Tenggara Timur
10	Gubernur Sulawesi Selatan
11	Gubernur Sulawesi Tengah
12	Gubernur Sulawesi Tenggara
13	Gubernur Sulawesi Utara
14	Gubernur Sumatera Barat
15	Bupati Aceh Selatan
16	Bupati Aceh Timur
17	Bupati Pandeglang
18	Bupati Seluma
19	Bupati Boalemo
20	Bupati Gorontalo Utara
21	Bupati Pohuwato
22	Bupati Bandung Barat
23	Bupati Bangkalan
24	Bupati Bondowoso
25	Bupati Sampang
26	Bupati Situbondo
27	Bupati Bengkayang
28	Bupati Kapuas Hulu
29	Bupati Kayong Utara
30	Bupati Ketapang
31	Bupati Landak
32	Bupati Melawi
33	Bupati Sambas
34	Bupati Sanggau
35	Bupati Sintang
36	Bupati Hulu Sungai Utara
37	Bupati Banjar
38	Bupati Seruyan
39	Bupati Berau
40	Bupati Malinau
41	Bupati Nunukan
42	Bupati Bintan
43	Bupati Karimun
44	Bupati Kepulauan Anambas
45	Bupati Natuna
46	Bupati Lampung Barat
47	Bupati Pesisir Barat
48	Bupati Buru
49	Bupati Kepulauan Aru
50	Bupati Halmahera Barat
51	Bupati Halmahera Selatan

No.	Daftar Tujuan Surat
52	Bupati Kepulauan Morotai
53	Bupati Kepulauan Sula
54	Bupati Bima
55	Bupati Lombok Barat
56	Bupati Lombok Tengah
57	Bupati Lombok Timur
58	Bupati Lombok Utara
59	Bupati Sumbawa Barat
60	Bupati Alor
61	Bupati Belu
62	Bupati Kupang
63	Bupati Manggarai
64	Bupati Manggarai Barat
65	Bupati Manggarai Timur
66	Bupati Nagekeo
67	Bupati Rote Ndao
68	Bupati Sumba Barat Daya
69	Bupati Sumba Tengah
70	Bupati Sumba Timur
71	Bupati Timor Tengah Selatan
72	Bupati Keerom
73	Bupati Lanny Jaya
74	Bupati Pegunungan Bintang
75	Bupati Sarmi
76	Bupati Biak Numfor
77	Bupati Yalimo
78	Bupati Kaimana
79	Bupati Raja Ampat
80	Bupati Sorong
81	Bupati Sorong Selatan
82	Bupati Bengkalis
83	Bupati Indragiri Hilir
84	Bupati Kepulauan Meranti
85	Bupati Rokan Hilir
86	Bupati Mamuju Tengah
87	Bupati Jeneponto
88	Bupati Banggai Kepulauan
89	Bupati Banggai Laut
90	Bupati Buol
91	Bupati Parigi Moutong
92	Bupati Tolitoli
93	Bupati Bombana
94	Bupati Buton Tengah
95	Bupati Kolaka Timur
96	Bupati Konawe
97	Bupati Konawe Kepulauan
98	Bupati Kep. Sangihe
99	Bupati Kepulauan Talaud
100	Bupati Pasaman barat
101	Bupati Solok Selatan
102	Bupati Kepulauan Mentawai
103	Bupati Musi Rawas
104	Bupati Musi Rawas Utara
105	Bupati Nias Selatan
106	Bupati Serdang Bedagai
107	Bupati Nias